

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Agus, Sulastiyono. 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Alfabeta. Bandung.
- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama. 2018. Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)“, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm. 277. Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum, Liberty. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Endar Sugiarto. 1999. Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa, Gramedia. Jakarta.
- Ermaya, Suradinata. 2002. Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu. Ramadan. Bandung.
- Fuady, Munir. 2003. Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gautama, S. 2009. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Raja Grafindo. Depok.
- Kamsir. 2017. Customer Service Excellent Teori dan Praktik, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- L.P, Sinambela. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi, Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua Sekolah Tinggi Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Marpaung, Laden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika. Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikto. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Miko Budi Eryanto, Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moenir, A.S.2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara. Jakarta.
- Mukarom, Zaenal, Muhibudin Wijaya Laksana. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Sinar Grafika. Bandung.
- Mukarom, Zaenal, M. Laksana. 2018. Manajemen Pelayanan Publik. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Prof.Chainur Arrasjid. 2020. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Putra, Fadhillah. 2012. New Public Governance, UB Press. Malang.
- Raharjo, Satjipto.2009.Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.Genta Publishing.Yogyakarta.
- Rais Ahmad. 1996. Peran Manusia dalam Penegakan Hukum. Pustakan Antara. Jakarta.
- Shanty, Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.
- Sentanoe, Kertonegoro (A). 1987.Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet.II. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.1986.Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri.2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suparni, Niniek.2007.Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafik.Jakarta.
- Syafie, I. K., 1999. Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta. Jakarta.

### **Jurnal**

Aprilia Malik, Siswidiyanto, Endah Setyowati, Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Voll.No.5 Maret 2012. Diakses tanggal 9 Desember 2021

Gerry Putra Ginting, 2015, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Diakses tanggal 9 Desember 2021

Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1, Diakses tanggal 9 Desember 2021

Rakhmadani, S. 2017. Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humanior.

Sandy, Soewarto, Arie, “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android,” Jurnal, Bogor: FMIPA Universitas Pakuan. Diakses tanggal 9 Desember 2021

Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, tanggal 9 Desember 2021.

Suhendriyo, A. Setiawati, B., & Hayati, R. 2019. Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). Jurnal Administrasi Publik, diakses tanggal 11 Februari 2022.

Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Diakses tanggal 9 Desember 2021

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : 007/A/ JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/06/0215 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-225/ A/J.A/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

### **Lain-lain**

Harry Pugh, Sosiawan. 2003. *Telaah Tentang Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial* (Pandangan 6 Fraksi MPR Dalam Proses

Amandemen Ke-4 Pasal 34 UUD'45). Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.Jakarta.

Collin Colbuild. 2004.*English Dictionary*, 1997, hal. 1898, *Pivatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.